

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis Kebijakan Publik

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah langkah krusial dalam pengambilan Keputusan kebijakan yang efektif. Dalam konteks ini, analisis berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut definisi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, analisis melibatkan proses penyelidikan yang mendalam terhadap suatu peristiwa untuk memahami situasi yang sebenarnya. Selain itu, analisis juga melibatkan penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagian dan analisis hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan makna yang lebih mendalam.

Menurut E.S. Quade, analisis biasanya diartikan sebagai proses yang melibatkan penggunaan intuisi dan ekspresi pendapat. Dalam definisi ini, analisis tidak hanya terbatas pada evaluasi kebijakan dengan cara membagi-bagi ke dalam komponen-komponen yang berbeda, tetapi juga melibatkan perencanaan dan sintesis alternatif yang baru dan inovatif. Aktivitas yang dilakukan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan perspektif mengenai isu-isu yang diantisipasi, hingga evaluasi yang lebih dalam terhadap suatu program yang komprehensif.¹²

¹² Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu struktur konseptual yang dibentuk berdasarkan ide-ide yang dikemukakan oleh kelompok, individu, atau pemerintah. Dalam bentuknya, kebijakan dapat berfungsi sebagai pedoman yang diikuti. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kebijakan memiliki kualitas yang sama. Beberapa kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang bijaksana.¹³

Menurut Wirawan, kebijakan adalah suatu rencana yang digunakan untuk melaksanakan fungsi dan tugas Menteri. Kebijakan yang telah berlaku akan terus berlangsung hingga digantikan oleh kebijakan baru. Perubahan kebijakan ini biasanya terjadi ketika kebijakan lama tidak lagi efektif dan efisien atau terjadi pergantian pejabat.¹⁴ Menurut Muchlis Hamdi, kebijakan memiliki fungsi penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya bangsa melalui interaksi dalam Masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan fungsi tersebut, ciri-ciri suatu kebijakan yang dinilai tepat yaitu:¹⁵

- a. Efisiensi yang terkait dengan pertanyaan tentang seberapa banyak sumber daya yang diperlukan guna mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Efektivitas, sehubungan dengan pertanyaan apakah hasil yang diharapkan dapat dicapai.
- c. Kecukupan, mempertimbangkan tentang seberapa jauh hasil yang diharapkan telah mengatasi masalah yang dihadapi.

¹³ Antonio Pradjasto, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Demos, 2011), 2.

¹⁴ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

¹⁵ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).

- d. Keadilan, sedangkan ciri keadilan terkait dengan pertanyaan apakah biaya dan manfaat diterapkan secara proposional dan adil terhadap berbagai kelompok yang terlibat.

3. Kebijakan Publik

Dalam Masyarakat, kebijakan publik adalah suatu bentuk kebijakan yang diterapkan. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik melibatkan Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan visi bangsa. Kebijakan publik tersebut dirumuskan oleh Lembaga legislative dan Lembaga eksekutif. Menurut Thomas Gye, kebijakan publik diartikan sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*). Pengertian tersebut mencakup bahwa kebijakan ditetapkan oleh lembaga pemerintah dan bukan oleh organisasi swasta, serta kebijakan tersebut mencakup pilihan yang harus dijalankan atau tidak dijalankan.

Muclis Hamdi mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian Tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintah negara. Berdasarkan definisi kebijakan publik, tiga karakteristik yang dominan adalah tujuan kebijakan publik yang berfokus penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi, kebijakan publik berbentuk pola Tindakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, setiap kebijakan publik selalu tercantum dalam hukum yang berlaku. Salah satu kebijakan publik yang diimplementasikan di Indonesia adalah kebijakan mengenai pendidikan.¹⁶

¹⁶ Ismi Solikatur, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 14-15

B. Manajemen Keuangan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Secara etimologi, kata manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*to manage*” yang memiliki sinonim seperti *to head* (mengurus), *to control* (memeriksa), dan *to guide* (memimpin). Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia “*managiere*” yang berarti pelatih. Dalam bahasa latin, “*managiere*” terdiri dari dua kata, yaitu “*manus*” (tangan) dan “*agere*” (melaksanakan atau melakukan). Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai *siyasah*, *idarab*, dan *tadbir*.¹⁷

Manajemen keuangan pendidikan merupakan pendekatan strategis dalam mengatur sumber daya finansial di sektor pendidikan. Ini melibatkan proses perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pemantauan terhadap dana yang berhubungan dengan institusi pendidikan atau program pendidikan tertentu. Manajemen keuangan dalam ranah pendidikan melibatkan pengambilan keputusan terkait alokasi dana, pengelolaan anggaran, pengawasan pengeluaran, serta evaluasi kinerja keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.¹⁸

Menurut Depdiknas, manajemen keuangan pendidikan adalah proses administrasi yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang terintegrasi untuk mengelola keuangan sekolah secara efektif dan efisien.¹⁹

¹⁷ Nur Zazin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Edu Litera, 2018), 47.

¹⁸ Prasetya, A., & Yuniarti, M. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

¹⁹ Akhmad Sudrajat, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*, <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/12/17/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>, diakses 02 Juni 2023 pukul 23.52 WIB.

Menurut Maysarah, Manajemen keuangan adalah suatu proses yang menyertakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan mengatur keuangan dengan menggunakan tenaga orang lain. Dalam konteks manajemen keuangan di sekolah, proses ini dimulai dengan perencanaan anggaran, dilanjutkan dengan pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan diakhiri dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif.²⁰

Menurut Husnan Suad, manajemen keuangan melibatkan pengelolaan fungsi keuangan yang efektif. Fungsi keuangan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keuangan, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.²¹ Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan sekolah.²²

Berdasarkan beberapa sudut pandang yang telah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan melibatkan proses pengelolaan yang terintegrasi terhadap fungsi keuangan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketatausahaan keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengakses dan mengoptimalkan sumber pendanaan, sehingga dana

²⁰ Ridwan Idris, *Manajemen Pendidikan Dalam Aplikasinya di Sekolah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 128

²¹ Husnan Suad, *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), 4

²² Siska Yulia Weny, "Manajemen Keuangan Pada Sekolah Dasar Untuk Meminimalkan Pajak Yang Terutang", *SITTAH: Journal of Primary Education*, Vol. 2 No. 1 (April 2021), 19.

dapt digunakan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga keuangan sekolah dapat dipantau dan dikontrol dengan baik. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:²³

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah.
- c. Mengoptimalkan penggunaan anggaran sekolah.

Menurut Martono dan Agus, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai Perusahaan dengan cara memaksimumkan kinerja keuangan yang dapat diukur melalui indikator harga saham Perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan dapat meningkatkan kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kemakmuran perusahaan.²⁴ Kemudian menurut Husnan, tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan strategis, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan begitu, manajemen keuangan dapat memaksimumkan kinerja keuangan dan meningkatkan kepentingan pemegang saham.²⁵

Adapun untuk mencapai tujuan manajemen keuangan yang efektif, sekolah harus berupaya meningkatkan kreativitas dalam mengakses dan mengelola sumber pendanaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk bendaharawan yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik dan memahami peraturan keuangan yang berlaku. Selain itu, sekolah juga harus mampu memanfaatkan dana secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²³ Kadarman Jusuf, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1992), 18

²⁴ Martono dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonosia, Edisi-3, 2010), 12

²⁵ Husnan Suad, *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, 6

Selanjutnya fungsi manajemen dalam Pendidikan berfokus pada pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen dapat dipahami melalui analisis aktivitas utama para manajer, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Dengan demikian, manajemen dapat memberikan kontribusi pada pengembalian keputusan ekonomi yang tepat dalam substansi pendidikan.²⁶

Adapun fungsi manajemen keuangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan, (2) Penganggaran keuangan, (3) Pengelolaan keuangan, (4) Pencairan keuangan, (5) Penyimpanan keuangan, (6) Pengawasan keuangan, (7) Penilaian keuangan, dan (8) Pelaporan keuangan.²⁷

Menurut beberapa pendapat, fungsi manajemen keuangan memiliki dua aspek utama. Pertama, manajemen keuangan harus mampu menggunakan dana secara efektif dan efisien. Kedua, manajemen keuangan harus mampu mengakses dan mengelola sumber pendanaan yang tersedia. Dalam konteks ini, fungsi manajemen keuangan juga melibatkan keputusan investasi, keputusan pendanaan, serta keputusan pengelolaan aset yang tepat dan strategis.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam manajemen keuangan sekolah, perlu diingat beberapa prinsip penting. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan.²⁸ Disamping itu, prinsip efektivitas juga perlu diperhatikan.

²⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 92

²⁷ Mohamad Mustari, Ph.D, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 168

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 16

a. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam konteks manajemen, transparansi berarti adanya kejelasan atau keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Dalam Lembaga Pendidikan, transparansi dalam manajemen keuangan berarti adanya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, termasuk sumber pendanaan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban sehingga memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami informasi tersebut.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks manajemen keuangan berarti seseorang dapat diukur dan dinilai oleh orang lain berdasarkan kinerja dan capaiannya dalam mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam manajemen keuangan sekolah, akuntabilitas berarti penggunaan dana sekolah harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, sehingga pihak sekolah dapat membelanjakan uang dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Garner memperluas definisi efektivitas dengan mempertimbangkan bahwa efektivitas tidak hanya terbatas pada pencapaian tujuan, melainkan juga meliputi hasil yang berkualitas terkait dengan visi lembaga dan tujuan yang ditetapkan. *Effectiveness characterized by qualitative outcome*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*.²⁹

²⁹ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, 165-167.

d. Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal serta sesuai keinginan. Efisiensi berarti memaksimalkan hasil pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien, seperti mengoptimalkan penggunaan dana, tenaga, atau waktu. Dalam definisi ini, efisiensi diwakili oleh perbandingan yang baik antara *input* dan *output* serta antara daya dan hasil, sehingga mencapai hasil yang lebih efektif. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang sama, namun dengan hasil yang maksimal.³⁰

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator keberhasilan sebuah organisasi dalam meraih tujuannya. Suatu tugas dianggap efektif jika dapat menghasilkan keluaran tertentu dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.³¹ Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini selalu berkaitan dengan perbandingan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh. Efektivitas memiliki peran penting dalam menentukan sukses suatu organisasi, karena memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya.³²

Memaknai efektivitas dapat bervariasi bagi setiap individu, tergantung pada perspektif dan kepentingan masing-masing. Hal ini diakui oleh Chung dan

³⁰ Markus Zahnd, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, (Yogyakarta Kanisius, 2006), 200.

³¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 134

³² Syamsir, *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec.Kulo Kab.Sidrap*, (S-1 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin, 2014), 25

Maginson, “*efektivitas means different people*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti menghasilkan efek (akibat, pengaruh, atau kesan), manjur atau mujarab, dan mampu membawa hasil. Oleh karena itu, efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya seluruh tugas utama, terpenuhinya tujuan, kepatuhan terhadap jadwal, serta partisipasi aktif dari para anggota. Oleh karena itu, efektivitas MBS merujuk pada sejauh mana MBS berhasil menyelesaikan seluruh tugas sekolah, melibatkan Masyarakat, serta memperoleh dan mengelola sumber daya, dana, dan pengeluaran untuk mencapai tujuan sekolah.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dalam suatu organisasi dapat dilihat dari berbagai perspektif tergantung pada penilaian masing-masing individu sehingga sulit untuk diukur. Efektivitas dapat diukur berdasarkan tujuan yang telah dicapai suatu organisasi. Jika tujuan organisasi telah tercapai, maka efektivitas dapat dievaluasi. Suatu organisasi dianggap beroperasi dengan efektif jika tujuannya tercapai. Hal yang paling krusial adalah bahwa efektivitas program ditentukan oleh metode program dalam mencapai tujuan tertentu, tidak selalu ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Richard dan M. Steers, alat ukur efektivitas kinerja antara lain:³³

- a. Kemampuan menyesuaikan diri

³³ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 46.

Kemampuan manusia memiliki banyak keterbatasan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan perlu bekerjasama dengan orang lain. Keberhasilan sebuah organisasi tergantung pada kerjasama untuk mmeraih tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap individu yang tergabung dalam suatu organisasi harus mampu beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

b. Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah hasil yang diraih setiap individu dalam melaksanakan tugasnya, didasarkan pada kemampuan, pengalaman, ketekunan, dan kedisiplinan mereka sehingga tugas dapat diselesaikan dengan optimal.

c. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja merujuk pada tingkat kebahagiaan yang dirasakan seseorang terhadap pekerjaannya di dalam sebuah organisasi.

d. Kualitas

Kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas jasa dan produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesuksesan operasional dan reputasi organisasi.

e. Penilaian atau evaluasi dari pihak luar

Penilaian terhadap suatu organisasi atau elemen lainnya dalam lingkungan organisasi umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.

Selain itu, menurut Duncan yang dikutip oleh Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang menjelaskan tentang ukuran efektifitas, antara lain:³⁴

a. Pencapaian Tujuan

Maksudnya adalah semua usaha untuk mencapai tujuan harus dianggap sebagai suatu proses atau metode yang memerlukan langkah-langkah tertentu. Dalam meraih tujuan, terdapat beberapa faktor seperti waktu dan target yang konkret.

b. Integrasi

Maksudnya adalah evaluasi terhadap kemampuan sebuah lembaga untuk mengatur pertemuan, mencapai kesepakatan, dan berkomunikasi dengan lembaga lainnya. Pada dasarnya, ini tentang bagaimana lembaga terhubung melalui proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Kapabilitas suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya menjadi faktor penting dalam menilai proses rekrutmen atau penempatan karyawan.

Menurut Sugiyono dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:³⁵

a. Ketepatan sasaran program, merujuk pada seberapa baik anggota program sesuai dengan yang diharapkan saat ditetapkan.

³⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, 53.

³⁵ Kartika Febri Yuliana, Skripsi: *EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS (P2KM)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 29-30

- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaran program untuk melakukan penyebaran informasi program guna mengomunikasikan rincian pelaksanaannya kepada Masyarakat secara luas dan peserta program secara spesifik.
- c. Tujuan program, yaitu seberapa jauh prestasi program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah program selesai dalam bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam metode untuk menilai keefektifan sesuai dengan indikator yang akan dibicarakan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah dimensi keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak berkaitan dengan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, melainkan hanya fokus pada pencapaian tujuan dari program kegiatan yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi adalah:³⁶

a. Waktu

Ketetapan waktu dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditetapkan merupakan hal yang sangat penting. Semakin lama pekerjaan itu

³⁶ Mellani, “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada SMA Aisyiyah 1 Palembang*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Palembang, 2016)

diselesaikan, semakin besar efektivitasnya karena waktu yang lebih banyak diberikan.

b. Tugas

Bawahan perlu diberikan tugas yang penting dan signifikan yang didelegasikan oleh karyawan.

c. Motivasi

Manajer bisa memberikan dorongan kepada bawahan dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive. Semakin karyawan termotivasi untuk bekerja dengan sikap positif, semakin baik pula hasil kerja yang dicapai.

d. Produktivitas

Seorang karyawan dengan produktivitas kerja yang tinggi akan mampu mencapai efektivitas kerja yang optimal, dan hal yang sama berlaku sebaliknya.

e. Evaluasi kerja

Manajer memberikan motivasi, dukungan, dan informasi kepada bawahan. Sebagai gantinya, bawahan harus menyelesaikan tugas dengan baik dan hasilnya akan dievaluasi untuk menentukan apakah tugas tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

f. Pengawasan

Dengan adanya pengawasan, kinerja karyawan dapat terus dipantau yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaksanaan berbagai tugas.

g. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang seimbang melibatkan faktor-faktor seperti tata ruang, Cahaya alami, dan suara yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan produktivitas karyawan dalam melakukan pekerjaan.

h. Fasilitas

Fasilitas adalah sarana dan peralatan yang disediakan oleh atasan untuk mendukung pekerjaan. Sarana yang lebih baik dapat meningkatkan konsentrasi karyawan saat bekerja.

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berfokus pada pemberian dukungan dana operasional non-personalia kepada satuan pendidikan dasar yang melaksanakan program wajib belajar. Sedangkan, standar biaya operasional non-personalia adalah acuan biaya untuk kegiatan operasional non-personalia. Hal ini adalah bagian dari keseluruhan agar pendidikan dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.³⁷

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 menjelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah yang menyediakan dana langsung untuk SMK, baik Negeri maupun Swasta, dengan jumlah bantuan yang diterima sekolah.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Dasar Hukum Dana BOS

Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah meliputi:³⁸

- a. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
- d. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PM K.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada sebuah Kementerian/Lembaga.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidai'iyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

³⁸ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2016. Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS SMK Dengan Menggunakan Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP). Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 10-11.

3. Tujuan Dana BOS

Tujuan utama Dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih dikenal sebagai Dana BOS adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum, Dana BOS digunakan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah ini dimulai sejak tahun 2005 sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah menjamin penyelenggaraan pendidikan tanpa biaya.³⁹

Selain itu, program BOS bertujuan khusus untuk:

- a. Membebaskan biaya bagi seluruh peserta didik SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP Satap/ SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- c. Mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah;
- d. Menyediakan peluang bagi seluruh peserta didik dari keluarga dengan kondisi ekonomu kurang mampu untuk mengakses layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Jadi, Dana BOS bukan hanya berupa bantuan finansial untuk siswa dari keluarga miskin. Dana ini memiliki tujuan yang sangat relevan dengan program belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, yang bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh jajaran masyarakat. Selain itu, dana BOS juga

³⁹ Arlin Sarlince Natara dan Iskandar Ladamay, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama”, Vol 2, Tahun 2018.

berperan dalam membantu mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa untuk generasi masa depan.

4. Pengelolaan BOS

Keberhasilan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diukur melalui efektivitas pengelolaan dan alokasi dana yang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran dan pengelolaan dana BOS harus patuh terhadap panduan teknis yang telah ditetapkan. Apabila proses penggunaan dan pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, maka tujuan program BOS dapat tercapai dan sekolah dianggap mampu mengelola dana tersebut secara efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah dalam menentukan penggunaan dana untuk kegiatan operasional sekolah. Mulyasa menekankan bahwa seorang kepala sekolah yang berkompeten seharusnya mampu mengelola keuangan sekolah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, hingga pelaporan.⁴⁰

a. Perencanaan Dana BOS

Perencanaan memegang peran yang penting dalam membangun dan menentukan arah suatu sistem atau aktivitas. Dengan adanya perencanaan, beberapa hal dapat lebih mudah tercapai, seperti organisasi dapat mengakses dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan, anggota organisasi dapat konsisten dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan

⁴⁰ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 194.

tujuan dan prosedur yang telah dipilih, serta kemajuan dapat terus dipantau dan diukur. Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan, apabila tingkat kemajuan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁴¹

Perencanaan pengelolaan dana BOS dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan tahunan sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang kemudian disosialisasikan kepada Kepala Sekolah, guru, dan komite sekolah. Setelah itu, RAKS kemudian dipublikasikan di papan pengumuman sekolah semua anggota sekolah dapat mengetahuinya. Tahap berikutnya adalah penyusunan proposal dana BOS atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS. RKAS disusun sesuai dengan panduan teknis (juknis), dan sumber dana termasuk dana BOS disusun dalam RKAS sebagai dokumen proposal dana BOS atau RAB BOS.⁴²

Untuk memperoleh alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), informasi mengenai jumlah siswa dan kondisi keuangan siswa penerima perlu disiapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS melibatkan beberapa tahapan yang penting, termasuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) BOS dengan partisipasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, staf pengajar, komite sekolah, dan pihak Yayasan.

b. Pelaksanaan Dana BOS

⁴¹ T. Hani Hadoko, *Manajemen*, Edisi II (Yogyakarta: BPFE, 2011), 23.

⁴² Sri Wahyuni Oktavi Sari, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)", *Administrasi Pendidikan*, 2 (2017), 3.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS melibatkan berapa aspek, yaitu penyaluran Dana BOS, pengambilan Dana BOS, penggunaan Dana BOS, pembelanjaan dana BOS, pembukuan dana BOS, pengembalian dana BOS, dan perpajakan terkait Dana BOS.

1) Penyaluran Dana BOS

Dalam regulasi yang berlaku, penyaluran dana BOS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dalam juknis BOS, dana tersebut disalurkan langsung ke rekening sekolah yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Penyaluran dana BOS tahun 2023 akan dilakukan dalam dua tahap penyaluran, sesuai ketentuan PMK 204/2022 Pasal 21 ayat a dan b sebagai berikut:⁴³

- a) Penyaluran Dana BOS tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, untuk penyaluran paling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- b) Penyaluran Dana BOS tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota yang belum disalurkan, untuk penyalurannya paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Sebelum dana BOS dapat disalurkan, persyaratan penyaluran harus terpenuhi dengan syarat bahwa lembaga pendidikan harus melaporkan realisasi dana BOS terlebih dahulu. Setelah proses penyaluran selesai, dana

⁴³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik” (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022)

BOS dapat digunakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun.

2) Pengambilan Dana BOS

Syarat Pengambilan dana BOS, sekolah wajib menunjukkan dokumen berikut kepada bank penyalur, yaitu:

- a) Surat Keputusan pengangkatan kepala sekolah dan bendahara sekolah
- b) Akta pendirian Sekolah atau Surat Izin Operasional Sekolah yang masih berlaku
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) kepala sekolah dan bendahara sekolah
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama sekolah (untuk SMK Negeri)

Adapun batas waktu konfirmasi rekening dan pengembalian dana yaitu pihak sekolah wajib mengkonfirmasi rekening sekolah dalam waktu 30 hari kalender setelah dana BOS diterima.

3) Penggunaan Dana BOS

Sekolah menggunakan dana BOS untuk mendukung pengeluaran operasional non-personalia, sesuai dengan kebutuhan yang diutamakan oleh sekolah.

Untuk penggunaan dana BOS terdapat komponen-komponen penggunaan dana BOS Reguler yaitu:⁴⁴

- a) Penerimaan Peserta Didik Baru

⁴⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, (Jakarta, 2022), 18.

- b) Pengembangan perpustakaan
- c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler
- d) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan asesmen
- e) Pelaksanaan administrasi sekolah
- f) Pengembangan kualifikasi guru dan staf kependidikan
- g) Pembiayaan langganan jasa dan layanan
- h) Pemeliharaan fasilitas sekolah
- i) Pemasangan perangkat multimedia pembelajaran
- j) Pelaksanaan program peningkatan kompetensi keahlian
- k) Dukungan kegiatan untuk memfasilitasi integrasi lulusan
- l) Pembayaran honor.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memperuntukan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di sekolah. sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS diberi bantuan untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas mereka agar dapat mencapai standar pelayanan minimal. Ini termasuk pengembangan perpustakaan, aktivitas pembelajaran dan ekstrakurikuler, penyediaan peralatan sekolah, serta optimalisasi laboratorium dan bahan praktek.⁴⁵

4) Pembelanjaan Dana BOS

Ungkapan pembelanjaan Perusahaan mengacu pada aktivitas Perusahaan yang terkait dengan bisnis. Ini termasuk berusaha membelanjakan uang tunai seefektif mungkin sambil mengamankan pembiayaan yang diperlukan dengan harga terbaik.

⁴⁵ Sri Wahyuni, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, 4.

Penggunaan dana BOS untuk pembelanjaan barang atau jasa mengikuti prosedur dan pertimbangan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang mengelolanya.

5) Pembukuan Dana BOS

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dalam Pasal 1 Ayat 26 menjelaskan tentang pembukuan, yaitu: “Metode pencatatan reguler yang disebut "pembukuan" digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, seperti aset, kewajiban, dan Untuk setiap akhir tahun pajak disampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Pernyataan ini mencakup informasi tentang modal, pendapatan, dan biaya serta keseluruhan biaya pengadaan dan pengiriman produk dan layanan”.

Tujuan pembukuan, menyusun statistic dan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS. Pengelola Dana BOS harus menyimpan catatan yang akurat dari semua operasi yang terkait dengan dana untuk persiapan pemeriksaan laporan keuangan sekolah di masa mendatang ketika tersedia. Selain itu, pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS telah diperbaiki strukturnya dan sekolah memiliki tata buku yang teratur.

6) Pengembalian Dana BOS

Sekolah yang menerima jumlah dana BOS lebih banyak daripada jumlah siswa yang terdaftar, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut, dengan aturan sebagai berikut:

- a) Jenis Surat Setoran Pemngembalian Belanja (SSPB) dengan MAP dan iuran pengeluaran untuk mengembalikan dalam tahun anggaran berjalan tahun 2014.

b) Menggunakan Formulir Setoran Bukan Pajak (SBP), pengembalian dilakukan setelah tahun anggaran (2015) dengan MAP dan Uraian Pengeluaran 423913NPWP, digunakan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atas nama Bendahara Direktorat Pembelanjaan Pembangunan SMK Nomor: 006670657016000. Format SSPB atau SSBP dicetak sebanyak lima rangkap masing-masing dengan tanda tangan basah Kepala Sekolah. SSPB/SSBP selanjutnya diteruskan ke Direktorat Pembinaan SMK.

7) Perpajakan Dana BOS

Ketentuan pajak dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merujuk pada regulasi yang berlaku, antara lain:⁴⁶

- a) Pajak pada dana BOS dipungut untuk setiap transaksi sesuai dengan aturan.
- b) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, pajak yang telah dipungut harus disetorkan melalui Bank Persepsi/Kantor Pos dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP).
- c) Pelaporan pajak harus diselesaikan dalam waktu 20 hari sejak akhir masa pajak.
- d) Mengenakan bea materai Rp.3.000,00 untuk transaksi pembelian Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 dan Rp.6.000,00 untuk transaksi pembelian Rp.1.000.000,00 atau lebih.

c. Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

1) Pengawasan

⁴⁶ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS SMK Dengan Menggunakan Teknik Analytical Hierarchy Process (AHP)*, 2016, 15.

Pengawasan adalah suatu tindakan yang melibatkan penerapan, evaluasi, dan jika diperlukan koreksi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan kerja sejalan dengan rencana dan untuk mengidentifikasi kekurangan atau tantangan dalam melaksanakan rencana tersebut. Langkah-langkah yang relevan kemudian akan direncanakan dan digunakan untuk memperbaikinya, baik pada saat itu atau waktu berikutnya, tergantung pada kelemahan dan tantangan yang dihadapi.

Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program BOS, perlu dilakukan monitoring dan supervise. Monitoring bertujuan untuk mengawasi kemajuan program BOS, sementara supervise bertujuan untuk mengevaluasi manfaat program bagi sekolah, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mencari Solusi untuk mengatasi masalah tersebut.⁴⁷

2) Evaluasi Dana BOS

Anderson menggambarkan evaluasi sebagai suatu proses untuk menilai hasil dari sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan mendukung pencapaian suatu tujuan. Stufflebeam, dalam pandangannya menganggap evaluasi sebagai suatu proses yang

⁴⁷ M. Manullang, Dasar-dasar Management, 173.

melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi yang berguna bagi para pengambil Keputusan dalam memilih opsi keputusan.⁴⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses untuk menghimpun data tentang kinerja suatu program, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memilih opsi yang sesuai dalam pengambilan Keputusan.

d. Pelaporan Dana BOS

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan program BOS, setiap pengelola di semua tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) harus menyampaikan laporan tentang aktivitasnya kepada pihak yang berwenang. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai penerima bantuan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil evaluasi dan penanganan masalah yang timbul.⁴⁹

5. Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam program BOS, sekolah diberikan dana yang dipertahankan sepenuhnya dan diurus secara independen oleh sekolah dengan dukungan guru dan dewan komite sekolah. Dengan cara ini, program BOS secara kuat mendukung pelaksanaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah yang pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan sekolah dengan memberikan kewenangan (otonomi), memberikan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan mendorong keterlibatan siswa dan masyarakat.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdullah Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktis Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1

⁴⁹ Fitri, Afrilliana, 2014, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Volume 2 Nomor 1, 35.

Pengelolaan program BOS mengikuti prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Managament*), yang berarti:⁵⁰

- a. Swakelola dan Partisipatif, program ini dijalankan dengan metode swakelola yang berarti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara mandiri. Dalam proses ini, warga sekolah dan masyarakat diajak untuk berperan aktif dengan memberikan dukungan pada semua tahapan program mulai dari perencanaan hingga pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Transparan, Pengelolaan dana perlu dilakukan dengan transparansi agar warga sekolah dan masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program.
- c. Akuntabilitas, Pengelolaan dana harus akuntabel dan mengikuti petunjuk teknis yang telah disepakati bersama.
- d. Demokratis, Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah/mufakat dimana setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau kritik, dan saran.
- e. Efektif dan efisien, penggunaan dana harus dilakukan secara efektif dan efisien. Program atau kegiatan BOS yang dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Seleksi siswa yang mendapatkan pembebasan atau bantuan biaya sekolah harus dilakukan dengan cermat dan mengikuti kriteria yang telah ditentukan.

⁵⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Petunjuk Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama", 30-31.

- f. Tertib Administrasi dan Pelaporan, Sekolah yang menerima dana BOS wajib menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Saling percaya, Penyaluran dana didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak yang memberikan dan menerima dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memelihara kepercayaan ini dengan menjalankan tanggung jawab dan komitmen yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari berbagai prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan dana BOS perlu mematuhi semua prinsip tersebut. Pengelolaan dana BOS selain harus didasarkan pada dasar hukum, juga harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS itu sendiri, yang serupa dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan.

E. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu memiliki makna kualitas, derajat, singkat. Secara terminology, mutu memiliki arti cukup yang beragam, penuh dengan interpretasi dan perdebatan. Standar mutu dalam pendidikan di Indonesia diterapkan melalui kurikulum nasional yang memuat tujuan, kompetensi isi, dan penilaian termasuk ujian nasional. Secara umum, mutu mengacu pada tingkat keunggulan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang dapat berupa kualitas baik yang nyata atau tidak nyata. Dalam dunia Pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil belajar.⁵¹

Mutu adalah hasil dari proses yang terorganisir untuk meningkatkan keluaran yang dihasilkan. Mutu bukanlah sesuatu benda yang Ajaib atau rumit, melainkan

⁵¹ Alfian Tri Kuntoro, "Manajemen Mutu Pendidikan Islam", *Jurnal Kependidikan*, Vol.7 No.1 (2019), 92

didasarkan pada logika dan akal sehat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan kerja harus dibuat yang memungkinkan pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil Masyarakat, dan perwakilan bisnis bekerja sama untuk memberikan sumber daya yang diperlukan siswa untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dalam Upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya pemimpin yang kompeten dan professional dalam bidang pendidikan⁵²

Mutu Pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia unggul. Sumber manusia unggul akan menentukan kemajuan dan ekonomi negara-bangsa. Tidak ada negara maju tanpa Pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, Pendidikan bermutu hanya bisa terwujud dengan dukungan kebijakan finansial yang memadai. Pendidikan yang berkualitas memiliki *man, money, material, machine, method* yang bermutu karena merupakan proses bukan hasil instan.⁵³

Dalam definisi Dadang Suhardi, Mutu Pendidikan diartikan sebagai hasil terbaik yang diharapkan dapat dicapai oleh lembaga pendidikan yang melampaui standar yang telah ditetapkan dan harus lebih daripada yang diharapkan.⁵⁴

Dalam konteks mutu pendidikan, perlu memahami bagaimana dimensi-dimensi pendidika saling berhubungan. Mengevaluasi kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada satu aspek, namun juga memerlukan analisi yang lebih komperhensif. Untuk menentukan kualitas pendidikan, beberapa indikator penting dapat digunakan, seperti prestasi siswa, fasilitas pendukung, kualitas guru, dan manajemen sekolah yang efektif.

⁵² Dalmeri, dkk, *Islamic Quality Education Management*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 122

⁵³ Jijen Musfah, *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 2

⁵⁴ Dadang Suhardi, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 66-67

Edward Sallis mengatakan, *Total Quality Management is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customer needs, wants, and expectations.*⁵⁵ Total Quality Management (TQM) adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, memberikan institusi pendidikan alat-alat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan siswa serta Masyarakat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

2. Prinsip Mutu Pendidikan

Meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan saat ini menjadi tujuan yang utama. Penting bagi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan bahwa pendidik harus memiliki prinsip manajemen yang efektif dan mengelola perubahan serta pengembangan menuju pendidikan yang bermutu.

Menurut Hensler dan Brunell, terdapat empat prinsip dasar yang penting dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Prinsip Pelanggan, mutu tidak hanya berarti memenuhi standar tertentu, namun juga ditentukan oleh kepuasan dan harapan pelanggan, sehingga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Respect Terhadap Setiap Orang, dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap individu di dalamnya dianggap memiliki potensi yang signifikan dan berpotensi untuk berkembang menjadi sumber daya yang berkontribusi pada masyarakat.

⁵⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 73.

⁵⁶ Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 73.

- c. Manajemen Berdasarkan Fakta, sekolah harus berorientasi pada data yang akurat, sehingga setiap Keputusan dibuat berdasarkan informasi yang jelas dan objektif, bukan hanya berdasarkan persepsi subjektif atau ingatan.
- d. Perbaikan Secara Berkala, diperlukan untuk memastikan kesuksesan setiap sekolah, sehingga perbaikan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk manfaatnya bagi individu, Masyarakat, dan bangsa atau negara. Dalam konteks ini, beberapa orang memandang mutu pendidikan dari perspektif Tingkat keilmuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. Dalam proses pendidikan, mutu pendidikan terkait dengan bahan ajar, metode pengajaran, fasilitas atau sarana prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan, lingkungan, dan faktor lainnya. Dalam konteks pendidikan, kualitas hasil belajar terkait dengan prestasi yang dicapai oleh suatu sekolah dalam jangka waktu tertentu. Prestasi ini bisa mencakup pencapaian dalam tes akademik seperti ulangan harian, ujian nasional, raport, serta keberhasilan di bidang non-akademik seperti olahraga, seni, atau keterampilan.⁵⁷

3. Ruang Lingkup Mutu Pendidikan

Mutu memiliki makna yang terkait dengan Tingkat kelebihan suatu produk atau hasil, baik berupa benda maupun jasa, serta dapat berupa atribut yang dapat dilihat maupun tidak. Dalam konteks pendidikan, mutu didefinisikan sebagai proses pendidikan dan hasil yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Dalam pendidikan yang berorientasi pada mutu, berbagai elemen interaktif berperan penting, seperti bahan ajar yang beragam termasuk kognitif, efektif, dan

⁵⁷ Choiru Fuad Yusuf, *Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan* (Jakarta: PT. Pena Citrasatria, 2008), 21.

psikomotorik, serta metodologi yang fleksibel sesuai dengan kemampuan guru, memungkinkan interaksi yang lebih efektif. Selain itu, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serta suasana yang kondusif memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Manajemen sekolah dan kelas memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan semua elemen tersebut dalam interaksi yang harmonis, termasuk interaksi antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas.

Kualitas atau mutu memiliki definisi yang beragam, mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional kualitas biasanya meliputi ciri-ciri langsung dari suatu produk, seperti kinerja, keterbatasan, kemudahan penggunaan, estetika, dan lain-lain. Di sisi lain, definisi kualitas yang lebih strategis melibatkan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga memungkinkan suatu produk untuk menjadi lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar. Gasperz menggambarkan konsep produk sebagai sintesis dari atribut yang memungkinkan produk tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, sehingga memuaskan kebutuhan yang telah ditentukan.⁵⁸

4. Standar Mutu Pendidikan

Secara Nasional standar mutu pendidikan merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar isi pendidikan menentukan batasan materi dan Tingkat keahlian yang harus dicapai oleh siswa dalam satu jenjang dan jenis pendidikan. Standar

⁵⁸ Ni Made Suciani, *Peta Mutu Pendidikan*, (Bali: LPMP, 2018), 4.

ini terdiri dari kriteria yang mengatur kompetensi tamatan, materi Pelajaran, dan silabus yang harus dipenuhi siswa.

b. Standar Proses

Standar proses pendidikan nasional mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran di suatu institusi pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan yaitu standar nasional pendidikan yang mengatur kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk dinyatakan lulus.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar pendidikan nasional yang mencakup syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pendidikan nasional mengatur kriteria minimal yang diperlukan untuk fasilitas belajar, ibadah, olahraga, perpustakaan, laboratorium, bengkel, tempat bermain dan rekreasi, serta sumber daya lain yang mendukung proses belajar-mengajar, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan nasional menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional untuk pendidikan yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan penilaian pendidikan, termasuk mekanisme, prosedur, dan alat.

5. Faktor-faktor Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan, Sudarwan Danim berpendapat bahwa perlu melibatkan beberapa faktor penting dalam Upaya meningkatkan mutu pendidikan antara lain:⁵⁹

a. Kepemimpinan kepala sekolah

Dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja yang jelas dan spesifik, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan berkomitmen pada kerja keras. Selain itu, mereka harus mampu memberikan layanan yang terbaik dan memantau disiplin kerja secara efektif.

b. Pendidik

Pendidik aktif berpartisipasi dalam kegiatan, termasuk workshop dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka. Hasil dari kegiatan ini dapat diterapkan di lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Peserta didik

⁵⁹ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 56.

Faktor peserta didik sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karena mereka menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kompetensi dan kemampuan siswa harus dikembangkan agar sekolah dapat memanfaatkan kelebihan yang dimiliki peserta didik.

d. Kurikulum

Dengan adanya kurikulum yang konsisten dan dinamis, standar mutu yang diinginkan dapat lebih mudah dicapai, sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal.

e. Jaringan kerja sama

Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di lingkungan sekolah maupun di luar, seperti organisasi lainnya.

F. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Efektivitas menunjukkan seberapa jauh kegiatan telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁶⁰ Oleh karena itu, sebuah kegiatan atau program dapat dianggap efektif jika tujuan yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

⁶⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara), 4.

Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan indikator efektivitas yang tepat. Indikator ini berguna untuk menilai seberapa jauh pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan guna meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan. Dalam pengelolaan dana BOS, perlu diikuti Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut. Adanya dana BOS diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, tim BOS sekolah harus mengelola dana BOS dengan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Deming, rendahnya mutu pendidikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang signifikan, termasuk kurikulum yang tidak efektif, infrastruktur yang tidak memenuhi syarat, lingkungan yang tidak mendukung, sistem yang tidak sesuai, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya pengembangan. Menurut Beeby (1996) dalam Susanto memaparkan bahwa mutu pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosiologi, dan pendidikan. Dalam ekonomi, pendidikan dianggap bermutu jika memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam sosiologi, pendidikan dianggap bermutu jika memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara dalam pendidikan sendiri, mutu ditinjau dari aspek proses belajar mengajar dan kemampuan lulusan dalam memecahkan masalah serta berpikir secara analitis.

Untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan, perlu adanya standar atau indikator yang dapat dijadikan tolak ukur. Berbagai teori telah dikemukakan mengenai kriteria atau ukuran efektivitas, seperti yang dikemukakan oleh Gibson dan tim, yang mengusulkan penggunaan

indikator pengukuran efektivitas, yaitu: (1) Produktivitas; (2) Kualitas; (3) Efisiensi; (4) Fleksibilitas; (5) Kepuasan; (6) Keunggulan; dan (7) Pengembangan. Selain itu, menurut Duncan yang dikutip Dalam karya Richard M. Steers yang berjudul "Efektivitas Organisasi", mengidentifikasi tiga kriteria yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu, (1) Organisasi harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) Integritas dalam berbagai aspek organisasi sangat penting; (3) Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi yang terjadi. Sementara itu menurut Budiani, efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator seperti ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, penting untuk memiliki pengelolaan dana BOS yang efektif. Upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat mempengaruhi hasilnya. Susanto menjelaskan bahwa kualitas pendidikan dapat diukur dengan menggunakan lima indikator kualitas yang berbeda, yaitu input, proses, output, sumber daya manusia, dan fasilitas.

Dalam penelitian tentang analisis efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Al-Amien Kediri, teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani diterapkan karena seluruh indikator efektivitas dalam teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.

